



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 12/AK.03/ND/F/2025

Kepada Yth. : Direktur Pengawasan dan Pengendalian I - IV
Dari : Plt. Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Manual Indikator Kinerja Program Deputy Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, maka dengan ini kami sampaikan Manual Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Tahun 2025, agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kinerja pegawai di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I s.d. IV.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Februari 2025

Plt. Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Manajemen ASN

*

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 12/AK.03/ND/F/2025
Tanggal : 28 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik
2.	Persentase hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti K/L/D sesuai kewenangan BKN
3.	Skor evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
4.	Persentase terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
5.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
6.	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks nspk/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Program	Persentase K/L/D yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi <p>Implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi adalah pengelolaan seluruh/sebagian besar aspek manajemen ASN yang didasarkan pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas. Prinsip ini diterapkan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.</p> <p>Selama ini, dalam menilai tingkat kualitas implementasi manajemen ASN dilaksanakan dengan instrumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indeks implementasi NSPK manajemen ASN, sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 - indeks sistem merit, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 - survey instansi <p>Dalam menilai baseline rencana strategis 2020-2024 untuk target 2025-2029, digunakan instrumen indeks sistem merit, yang telah disepakati bahwa selama tahun 2025 tidak dilakukan penilaian karena akan ditetapkan peraturan baru terkait penilaian penerapan manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi yang baru. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 digunakan pendekatan rentang penilaian penerapan sistem merit dengan kategori nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nilai 325-400, kategori sangat baik (IV) - nilai 250-324, kategori baik (III) - nilai 175-249, kategori kurang (II) - nilai 100-174, kategori buruk (I) <p>Untuk melakukan mengukur capaian target tahun 2025, yang angkanya ditetapkan sejumlah baseline tahun 2024, maka instrumen yang akan digunakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada akhir tahun penilaian, yang dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penilaian indeks sistem merit dengan instrumen regulasi baru; - penilaian indeks sistem merit dengan instrumen sebelumnya; atau - instrumen lain (survey, indeks nspk, dan sebagainya) yang disepakati
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah instansi yang memperoleh kategori IV dan III}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$
	Tujuan
	Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian, serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 2. Persentase hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti K/L/D sesuai kewenangan BKN

Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di K/L/D
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti K/L/D sesuai kewenangan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah diketahui oleh keseluruhan direktur pengawasan dan pengendalian dan disetujui oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.
	Formula
	$KK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi. 2. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome (X) Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 3. Skor evaluasi AKIP di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja																								
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.																								
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN																								
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV adalah gambaran nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara																								
	Formula Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut: <table><thead><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI ANGKA</th><th>INTERPRETASI</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang
	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI																						
	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																						
	A	>80-90	Memuaskan																						
BB	>70-80	Sangat Baik																							
B	>60-70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30-50	Kurang																							
D	>0-30	Sangat Kurang																							
Tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputi Bidang Wasdal BKN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputi Bidang Wasdal BKN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Wasdal BKN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputi Bidang Wasdal BKN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya																									
Satuan Pengukuran	Persentase																								
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya																								
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah																								
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading																								
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan																								
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN																								
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat																								
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata																								
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data																								
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize																								
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan																								
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi MAKO untuk pendataan dokumen SAKIP yang dibuat unit kerja																								

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 4. Persentase Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Persentase terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Telah Terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Direncanakan}} \times 100\%$
	Tujuan Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 5. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun Anggaran 2025
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Anggaran Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Yang Ditetapkan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk mengukur keselarasan kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dengan pemanfaatan anggaran yang direncanakan
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	http://spanint.kemenkeu.go.id/ dan/atau https://sakti.kemenkeu.go.id/
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi Sakti untuk melakukan pemantauan proses pertanggungjawaban keuangan

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKU 6. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja.
	Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh APIP. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.
	Formula
	$IKU = \frac{Jumlah\ Temuan\ Yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Temuan\ Hasil\ Audit\ BPK/Inspektorat} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Utama dalam memperbaiki tata kelola
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Laporan Audit BPK dan / atau Inspektorat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan